

Quo Vadis Implementasi Model Pengembangan Mutu Juran Di Lembaga Pendidikan Islam

Oleh

Muhammad Zamroji, MA

Email: Muhammadzamroji89@gmail.com

Jurusan Tarbiyah

Sekolah Tinggi Agama Islam At-Taahdzib Ngoro Jombang

Abstraksi: *Sistem pendidikan Islam merupakan wahanapembentuk manusia sempurna sebagai fondasi awal dalam pembangunan peradaban madani dan mewujudkan rahmat bagi seluruh umat manusia. Pendidikan Islam dianggap bermutu bila outputnyamampu mengembangkan pandangan hidup, sikap hidup dan ketrampilan hidup yang berperspektif Islam. Mutu dalam konsep Joseph M Juran adalah kesesuaian untuk penggunaan (fitness for use) yang memuat lima dimensi yaitu: mutu desain, mutu kesesuaian, ketersediaan, keamanan, dan field use dimana kecocokan penggunaan tersebut didasarkan atas lima ciri utama, yaitu: teknologi (kekuatan atau daya tahan), psikologis (citra rasa atau status), waktu (kehandalan), kontraktual (adanya jaminan), dan etika (santun ramah dan jujur). Implementasi konsep mutu Juran dalam lembaga pendidikan Islam dapat dilakukan dengan pemenuhan mutu desain pendidikan dengan merujuk pada berbagai kebijakan pemerintah tentang pendidikan, khususnya pendidikan Islam, yang tuangkan dalam visi, misi, dan tujuan pendidikan serta kurikulum yang ditawarkan. Tantangan pengembangan mutu lembaga pendidikan dalam hal ini sering kali dihadapkan pada kebijakan pemerintah khususnya berkaitan dengan sistem zonasi dan kurikulum sehingga lembaga pendidikan seringkali gagal mempertahankan 'keistimewaannya' masing-masing sebagaimana disyaratkan dalam konsepJuran. Tantangan berikutnya adalah tingkat kesadaran tentang mutu dan konsistensi dalam mempertahankan dan perbaikan terus menerus. Hal ini mengindikasikan bahwa permasalahan mutu pendidikan pada dasarnya merupakan permasalahan pendidikan yang bersifat dinamis yang tidak bisa diselesaikan dalamsatu waktu dan satu konsep pengembangan mutu.*

Kata Kunci: *Pendidikan Islam, Mutu, Josep M Juran*

Pendahuluan

Pendidikan merupakan “jantung” sekaligus “tulang punggung” masa depan bangsa dan negara.¹ Keberhasilan suatu bangsa sangat ditentukan oleh keberhasilan dalam memperbaiki dan memperbarui sektor pendidikan.² Sementara dalam konteks Islam, sistem pendidikan Islam merupakan suatu kawah candradimuka pembentuk manusia sempurna sebagai fondasi awal dalam pembangunan peradaban madani,³ dan mewujudkan rahmat bagi seluruh umat manusia.⁴ Dengan demikian, pendidikan tersebut dilakukan manusia dalam rangka memperbaiki dan meningkatkan taraf hidupnya, melalui proses pendidikan diharapkan manusia menjadi cerdas atau memiliki kemampuan, yang biasa dikenal dengan istilah *skill* dalam menjalani kehidupannya.⁵

Pendidikan itu sendiri merupakan usaha dasar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta ketrampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa dan negara. Kerenyapendidikan merupakan tugas dan tanggung jawab bersama antara keluarga, masyarakat, dan pemerintah.⁶ Melalui Undang-Undang Republik Indonesia nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (UU Sisdiknas) pasal 3 pemerintah menegaskan bahwa fungsi dan tujuan pendidikan nasional adalah “..mengembangkan dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, bertujuan untuk berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia beriman dan

¹Zian Farodis, *Panduan Manajemen Pendidikan ala Harvard University*, (Yogyakarta: Diva Press, 2011), 7.

²Aulia Reza Bastian, *Reformasi Pendidikan: Langkah-langkah Pembaharuan dan Pemberdayaan Pendidikan Dalam Rangka Desentralisasi Sistem Pendidikan Indonesia*, (Yogyakarta: Laper Pustaka Utama, 2002), 24.

³Sukarno, *Budaya Politik Pesantren Perspektif Interaksionisme Simbolik*, (Yogyakarta: Interpena, 2012), 15.

⁴Abuddin Nata, *Ilmu Pendidikan Islam*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2010), 44.

⁵Jerry H. Makawimbang, *Supervisi dan Peningkatan Mutu Pendidikan*, (Bandung: CV Alfabeta, 2011), 1.

⁶Abuddin Nata, *Kapita Selekta Pendidikan Islam: Isu-isu Kontemporer tentang Pendidikan Islam*. (Jakarta: Rajawali Press, 2012), 21.

bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis dan bertanggungjawab.” Dan untuk menjamin mutu pendidikan, pemerintah menetapkan adanya 8 (delapan) standar mutu lembaga pendidikan sebagaimana tertuang dalam UU No 19 Tahun 2005; “standar isi, standar kompetensi lulusan, standar proses, standar pembiayaan, standar pengelolaan, standar tenaga kependidikan, standar sarana prasarana dan standar penilaian pendidikan.”

Pada era kontemporer dunia pendidikan muncul berbagai model pengelolaan mutu pendidikan dengan mengadopsi model pengelolaan dunia industri, khususnya yang bergerak dalam bidang penyediaan (produk) barang atau jasa. Pengadopsian tersebut pada akhirnya menggeser paradigma pendidikan sebagai organisasi sosial murni menjadi organisasi produksi yang menghasilkan jasa pendidikan dan dibeli oleh konsumen.⁷ Salah satu model pengelolaan mutu tersebut adalah model *Total Quality Education* (TQE) yang diadopsi dari konsep *Total Quality Manajemen*,⁸ di mana salah satu perumusannya adalah Joseph M. Juran. Juran menyebut mutu sebagai ‘tepat untuk dipakai’. Konsep Juran menegaskan bahwa dasar misi mutu bagi sekolah adalah mengembangkan program dan layanan yang memenuhi kebutuhan pengguna. Konsep ‘tepat untuk dipakai’ dalam hal ini ditentukan pemakai bukan oleh pemberi. Pandangan Juran tentang mutu ini merefleksikan pendekatan rasional yang berdasarkan fakta terhadap organisasi bisnis dan amanat menekankan pentingnya proses perencanaan dan kontrol mutu. Titik fokus filosofi manajemen mutunya adalah keyakinan organisasi terhadap produktivitas individual.⁹

⁷Jaja Jahari dan Amirulloh Syarbini, *Manajemen Madrasah (Teori, Strategi dan Implementasi)*, (Bandung : Alfabeta, 2013), 158-159.

⁸ Edward Sallis, *Total Quality Management In Education Manajemen Mutu Pendidikan*, (Yogyakarta: IRCiSoD, 2006), I.

⁹*Ibid*, 6-10.

Mutu Pendidikan Islam

Sejumlah ahli memiliki pendapat yang berbeda tentang pendidikan Islam, di antaranya adalah bahwa pendidikan Islam ialah bimbingan yang diberikan oleh seseorang kepada seseorang agar ia berkembang secara maksimal sesuai dengan ajaran Islam. Bila disingkat, pendidikan Islam ialah bimbingan terhadap seseorang agar ia menjadi muslim semaksimal mungkin;¹⁰ Pendidikan Islam adalah bimbingan terhadap pertumbuhan rohani dan jasmani menurut ajaran Islam dengan hikmah mengarahkan, mengajarkan, melatih, mengasuh dan mengawasi berlakunya semua ajaran Islam;¹¹ Pendidikan Islam adalah pembentukan kepribadian muslim;¹² dan menurut hasil seminar Pendidikan Islam se-Indonesia tanggal 7 sampai 11 Mei 1960 di Cipayung Bogor: “Pendidikan Islam adalah bimbingan terhadap pertumbuhan rohani dan jasmani menurut ajaran Islam dengan hikmah, mengarahkan, mengajarkan, melatih, mengasuh, dan mengawasi berlakunya semua ajaran Islam”¹³ dapat disimpulkan bahwa pendidikan Islam pada dasarnya adalah bimbingan kepada peserta didik untuk menjadi pribadi Islam dalam sepanjang kehidupannya.

Sementara tentang mutu, mutu pendidikan diartikan sebagai gambaran dan karakteristik menyeluruh jasa pelayanan pendidikan secara internal, maupun eksternal yang menunjukkan kemampuannya, memuaskan kebutuhan yang diharapkan, atau yang tersirat mencakup input, proses dan output pendidikan.¹⁴ Pendapat senada juga diungkapkan Sudrajat, bahwa pendidikan yang bermutu adalah pendidikan yang mampu menghasilkan lulusan yang memiliki kemampuan atau kompetensi, baik kompetensi akademik maupun non akademik, yang dilandasi oleh kompetensi personal dan sosial, yang secara menyeluruh

¹⁰Ahmad Tafsir, *Ilmu Pendidikan dalam Perspektif Islam*, (Bandung, Remaja Rosda Karya, 2005), 32.

¹¹Arifin, *Ilmu Pendidikan Islam*, (Jakarta; Bumi Aksara, 2001), 41

¹²Zakiyah Darajat, *Ilmu Pendidikan Islam*. (Jakarta: PT Bumi Aksara, 2006), 27

¹³ Jamaluddin, Abdullah Aly, *Kapita Selekta Pendidikan Islam* (Bandung: Pustaka Setia, 1999), 9

¹⁴Syaiful Sagala, *Manajemen Strategik dalam Peningkatan Mutu pendidikan*, (Bandung, Alfabeta, 2011), 170

disebut sebagai kecakapan hidup (*life skill*).¹⁵ Menurut Dzaujak Ahmad, mutu pendidikan adalah kemampuan sekolah dalam pengelolaan secara operasional dan efisien terhadap komponen-komponen yang berkaitan dengan sekolah, sehingga menghasilkan nilai tambah terhadap komponen tersebut menurut norma/standar yang berlaku.¹⁶

Adapun kriteria mutu pendidikan yang baik sekolahan diharapkan memiliki beberapa indikator yang menunjukkan bahwa sekolahan tersebut sudah bisa dibilang bermutu. Indikatornya adalah lingkungan sekolah yang aman dan tertib, sekolah memiliki tujuan dan target mutu yang ingin dicapai, sekolah memiliki kepemimpinan yang kuat, adanya pengembangan staff sekolah yang terus menerus sesuai dengan tuntutan iptek dan adanya pelaksanaan evaluasi yang terus menerus terhadap berbagai aspek akademik dan administratif serta pemanfaatan hasilnya untuk penyempurnaan atau perbaikan mutu pendidikan.¹⁷

Menurut Muhaimin, mutu dalam konteks pendidikan Islam pada dasarnya sama dengan mutu pendidikan pada umumnya, hanya saja ada sedikit tambahan yaitu bagaimana sekolah atau madrasah bisa menyeimbangkan antara proses dan hasil pendidikan yang pada akhirnya peserta didik (lulusannya) menjadi manusia muslim yang berkualitas. Dalam arti, peserta didik mampu mengembangkan pandangan hidup, sikap hidup dan ketrampilan hidup yang berperspektif Islam. Pemahaman manusia berkualitas dalam khasanah pemikiran Islam sering disebut sebagai insan kamil yang mempunyai sifat-sifat antara lain manusia yang selaras (jasmani dan rohani, duniawi dan ukhrawi), manusia moralis (sebagai individu dan sosial), manusia nazhar dan i'tibar (kritis, berijtihad, dinamis, bersikap ilmiah dan berwawasan ke depan), serta menjadi manusia yang memakmurkan bumi.¹⁸

¹⁵ Sudrajat, *Manajemen Peningkatan Mutu Berbasis Sekolah*, (Bandung: Cipta Cemas Grafika, 2005), .17

¹⁶ Dzaujak Ahmad, *Petunjuk Peningkatan Mutu Pendidikan di Sekolah Dasar*, (Jakarta, Depdikbud, 1996), 8

¹⁷ Mulyasa, *Menjadi Kepala Sekolah yang Professional* (Bandung : PT. Rosda Karya, 2005), . 85

¹⁸ Muhaimin, *Pengembangan Kurikulum Pendidikan Agama Islam*. (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2005), . 201

Mutu pendidikan akan tercapai, apabila di dukung oleh seluruh komponen pendidikan yang terorganisir dengan baik. Beberapa komponen tersebut adalah *input*, *proses* dan *output*, dan ini perlu mendapatkan dukungans epenuhnya dari pihak yang mempunyai peran penting dalam lembaga pendidikan, dalam hal ini adalah kepala sekolah. Kepala sekolah merupakan pemimpin pendidikan yang berhubungan langsung dengan pelaksanaan program pendidikan di sekolah. Kepala sekolah sebagai penentu kebijakan di sekolah harus mampu memfungsikan perannya secara maksimal dan mampu memimpin sekolah dengan bijak dan terarah, serta mengarah kepada pencapaian tujuan yang maksimal pula, demi meningkatkan mutu pendidikan.¹⁹Tentang peran penting kepala sekolah ini, Mulyasa menyatakan bahwa erat hubungannya antara mutu kepala sekolah dengan berbagai aspek kehidupan sekolah, seperti disiplin sekolah, iklim budaya sekolah dan menurunnya perilaku nakal peserta didik.²⁰

Oleh karena itu untuk mewujudkan pendidikan yang bermutu dalam lembaga pendidikan (sekolah) selain penyusunan dan perencanaan, implementasi serta evaluasi atau pengendalian, maka juga dibutuhkan managerial yang bagus, profesional dan kompetensi kepala sekolah (penanggung jawab) memiliki Visi Misi yang jelas dan terarah serta dukungan dari masyarakat atau pihak-pihak yang terkait (*stakeholder*). Berkenaan dengan itu, Sudrajat mengemukakan bahwa pendidikan yang bermutu adalah pendidikan yang mampu menghasilkan lulusan yang memiliki kemampuan atau kompetensi akademik maupun kompetensi non akademik yang dilandasi oleh kompetensi personal dan sosial, yang secara menyeluruh disebut sebagai kecakapan hidup (*life skill*).²¹

Berkaitan dengan mutu pendidikan yang diselenggarakan lembaga pendidikan, Bila mengacu pada model Manajemen Peningkatan Mutu Berbasis Sekolah (MPMBS) yang menggunakan pendekatan *input-proses-output* maka

¹⁹Abdulloh Munir, *Menjadi kepala Sekolah Efektif*, (Jogyakarta:Ar-Ruzz Media, 2008),6

²⁰Mulyasa. E, *Menjadi Kepala Sekolah Profesional: Dalam Konteks Menyukkseskan MBS dan KBK*, (Bandung, PT. Remaja Rosydakarya, 2005),24-25.

²¹Sudrajat, *Manajemen Peningkatan Mutu Berbasis Sekolah*, (Bandung: Cipta Grafika, 2005),17.

kriteria dan karakteristik yang harus dipenuhi sekolah untuk menjamin mutu adalah;*pertama*,input pendidikan. Input pendidikan meliputi;

- a. Memiliki kebijakan mutu;
- b. Sumberdaya tersedia dan siap (baik sumberdaya manusia maupun budaya selebihnya seperti uang, peralatan, perlengkapan, bahan, dan lain sebagainya)²²;
- c. Memiliki harapan prestasi tinggi; d) fokus pada pelanggan, khususnya peserta didik.

Kedua, input manajemen, yaitu tugas yang jelas, rencana yang rinci dan sistematis, program yang mendukung bagi pelaksanaan rencana, ketentuan-ketentuan (aturan main) yang jelas sebagai pedoman bagi warga sekolah untuk bertindak, dan adanya sistem pengendali mutu yang efektif dan efisien untuk meyakinkan agar sasaran yang telah disepakatai dapat tercapai;²³

Ketiga, proses pendidikan, yang meliputi:

- a. Efektifitas proses belajar mengajar tinggi;
- b. Kepemimpinan yang kuat;
- c. Pengelolaan tenaga kependidikan yang efektif;
- d. Sekolah memiliki budaya mutu;
- e. Sekolah memiliki team work yang kuat, cerdas dan dinamis (karena output pendidikan merupakan hasil kolektif warga sekolah)²⁴;
- f. Memiliki kewenangan kemandirian;
- g. Partisipasi sekolah dan masyarakat (makin tinggi tingkat partisipasi makin besar pula rasa memiliki, makin besar pula rasa tanggung jawab, makin besar pula dedikasinya)²⁵;
- h. Sekolah memiliki keterbukaan manajemen;
- i. Sekolah memiliki kemauan untuk berubah baik psikologis maupun fisik;
- j. Sekolah melakukan evaluasi dan perbaikan secara berkelanjutan;
- k. Sekolah responsif dan antisipatif terhadap kebutuhan;

²²Departemen Pendidikan Nasional, *Manajemen Peningkatan Mutu Berbasis Sekolah*, 2000,18.

²³Ibid, 19.

²⁴Ibid, 13.

²⁵Ibid, 14.

1. Sekolah memiliki akuntabilitas (bentuk pertanggungjawaban yang jelas); m) sekolah memiliki suistainabilitas (keberlanjutan);

Keempat, Output pendidikan yang diharapkan, yaitu kinerja sekolah sebagai prestasi yang dihasilkan dari proses sekolah yang bisa diukur berdasarkan kualitas, efektifitas, produktifitas, efisiensi, inovasi, kualitas kehidupan kerja dan moral kerja.²⁶

Akan tetapi untuk penerapan pengelolaan mutu sekolah berbasis MBS ini akan berlangsung secara efektif dan efisien mensyaratkan adanya dukungan sumber daya manusia yang professional untuk mengoperasikan sekolah, dan dana yang cukup agar sekolah mampu menggaji staf sesuai dengan fungsinya, sarana dan prasarana yang memadai untuk mendukung proses belajar mengajar, serta dukungan masyarakat (orang tua).²⁷ Dalam rangka pelaksanaan manajemen peningkatan mutu berbasis sekolah, maka melalui partisipasi aktif dan dinamis dari orang tua, siswa, guru dan staf lainnya termasuk institusi yang memiliki kepedulian sekolah harus melakukan tahapan kegiatan sebagai berikut:

- a. Penyusunan basis data dan profil sekolah lebih representatif, akurat, valid dan secara sistematis menyangkut berbagai aspek akademis, administrative dan keuangan.
- b. Melakukan evaluasi dari (*self assessment*) untuk menganalisa kekuatan dan kelemahan mengenai sumber daya sekolah, personil sekolah, kinerja dalam mengembangkan dan mencapai target kurikulum dan hasil yang dicapai siswa berkaitan dengan aspek intelektual dan ketrampilan maupun aspek lainnya.
- c. Berdasarkan analisa tersebut sekolah harus mengidentifikasi kebutuhan sekolah dan merumuskan visi, misi dan tujuan dalam rangka menyajikan pendidikan yang berkualitas bagi siswanya sesuai dengan konsep pendidikan nasional yang ingin dicapai.
- d. Berangkat dari visi, misi dan tujuan peningkatan mutu tersebut, sekolah bersama-sama dengan masyarakat merencanakan dan menyusun program

²⁶Ibid, 11.

²⁷Hasbullah, *Otonomi Pendidikan "Kebijakan Otonomi Daerah dan Implikasinya terhadap Penyelenggaraan pendidikan"*, (Jakarta: Raja Grafindo persada, 2006), : 80-83

jangka panjang dan jangka pendek. Program tersebut memuat sejumlah aktifitas yang akan dilaksanakan sesuai dengan kebijakan nasional yang telah ditetapkan. Perencanaan program sekolah ini harus mencakup indikator atau target mutu apa yang akan dicapai dalam tahun tersebut sebagai proses peningkatan mutu pendidikan. Program ini disusun bersama antara sekolah, orang tua dan masyarakat untuk memulai kebutuhan masyarakat akan pendidikan yang bermutu yang sesuai dengan perkembangan IPTEK yang semakin Global ini.²⁸

Konsep Mutu Joseph M. Juran

Joseph Juran merupakan salah satu pelopor revolusi mutu di Jepang. Juran termashur dengan keberhasilannya menciptakan “kesesuaian dengan tujuan dan manfaat”. Ide ini menunjukkan bahwa produk atau jasa yang menghasilkan sudah memenuhi spesifikasi-spesifikasi, namun belum tentu sesuai dengan tujuan. Menurut Juran mutu adalah kesesuaian untuk penggunaan (*fitness for use*), ini berarti bahwa suatu produk atau jasa hendaklah sesuai dengan apa yang diperlukan atau diharapkan oleh pengguna. Definisi mutu sebagai ‘kesesuaian untuk digunakan (*fitness for use*)’ ini mengandung pengertian bahwa suatu produk atau jasa harus dapat memenuhi apa yang diharapkan oleh para pemakainya²⁹. Pengertian kesesuaian untuk digunakan ini mengandung lima dimensi yaitu: mutu desain, mutu kesesuaian, ketersediaan, keamanan, dan *field use*. Sementara kecocokan penggunaan tersebut didasarkan atas lima ciri utama, yaitu:

1. Teknologi, yaitu kekuatan atau daya tahan
2. Psikologis, yaitu citra atau status
3. Waktu, yaitu kehandalan
4. Kontraktual, yaitu adanya jaminan
5. Etika, yaitu santun, ramah dan jujur

²⁸Umaidi. 1999. *Manajemen Peningkatan Mutu Berbasis Sekolah* ”sebuah pendekatan baru dalam pengelolaan sekolah untuk meningkatkan mutu”....Artikel Konsep Dasar MPMBS

²⁹Fandy Tjiptono & Anastasia Diana, *Total Quality Management*, (Yogyakarta: Andi:2003), 53.

Salah satu konsep mutu yang terkenal dari Juran adalah konsep 85/15, bahwa 85 persen masalah-masalah mutu dalam sebuah organisasi adalah hasil dari desain proses yang kurang baik. Sehingga, penerapan system yang benar akan menghasilkan mutu yang benar. Dengan demikian, menurut Juran 85 persen masalah merupakan tanggung jawab manajemen, karena mereka memiliki 85 persen control terhadap organisasi.³⁰ Berkaitan dengan proses perwujudan mutu, Juran memperkenalkan adanya tiga proses mutu, yaitu;³¹

Pertama, perencanaan mutu (*quality planning*), meliputi identitas pelanggan, menentukan kebutuhan pelanggan, menentukan karakteristik hasil yang merupakan tanggapan terhadap proses kebutuhan pelanggan, menyusun sasaran mutu, mengembangkan proses yang dapat menghasilkan produk atau jasa yang sesuai dengan karakteristik tertentu, dan memperbaiki atau meningkatkan kemampuan proses. Perencanaan mutu, perencanaan mutu meliputi pengembangan produk, sistem, dan proses yang dibutuhkan untuk memenuhi atau melampaui harapan pelanggan. Langkah-langkah perencanaan mutu sebagai berikut:

- a. Menentukan siapa yang menjadi pelanggan;
- b. Mengidentifikasi kebutuhan para pelanggan;
- c. Mengembangkan produk dengan keistimewaan yang dapat memenuhi kebutuhan pelanggan;
- d. Mengembangkan sistem dan proses yang memungkinkan organisasi untuk menghasilkan keistimewaan; dan
- e. Menyebarkan rencana kepada level operasional.

Kedua, pengendalian mutu (*quality control*), terdiri dari: memilih dasar pengendalian, menentukan pengukuran, menyusun pengukuran, menyusun standar kerja, mengukur kinerja yang sesungguhnya, menginterpretasikan perbedaan

³⁰Dalam catatan Usman, 80/20; bahwa delapan puluh persen masalah terletak pada manajemen oleh sebab itu, sejak dini manajemen haruslah dilaksanakan seefektif dan seefisien mungkin. lihat Husaini Usman, Manajemen, (Jakarta, Bumi Aksara, 2014), 572.

³¹Sallis, Edward, *Total Quality Management in Education*, (Jogjakarta: IRCiSoI, Cet-7, 2008), 52-53.

antara standar dengan data nyata yang terjadi, dan mengambil keputusan atas perbedaan tersebut. Pengendalian mutu ini meliputi langkah-langkah berikut:

- a. Menilai kinerja mutu aktual;
- b. Membandingkan kinerja dengan tujuan;
- c. Bertindak berdasarkan perbedaan antara kinerja dan tujuan.

Ketiga, Perbaikan dan peningkatan mutu (*quality improvement*), terdiri dari peningkatan kebutuhan untuk mengadakan perbaikan, mengidentifikasi proyek untuk mendiagnosis kesalahan, menemukan penyebab kesalahan, mengadakan perbaikan-perbaikan, proses yang telah diperbaiki berada dalam kondisi operasional yang efektif, dan menyediakan pengendalian untuk mempertahankan perbaikan atau peningkatan yang telah dicapai.³² Perbaikan mutu harus dilakukan secara *on going* dan terus menerus. Langkah-langkah yang dapat dilakukan sebagai berikut:

- a. Mengembangkan infrastruktur yang diperlukan untuk melakukan perbaikan mutu setiap tahun;
- b. Mengidentifikasi bagian-bagian yang membutuhkan perbaikan dan melakukan proyek perbaikan;
- c. Membentuk suatu team proyek yang bertanggung jawab dalam menyelesaikan setiap proyek perbaikan;
- d. Memberikan team-team tersebut apa yang mereka butuhkan agar dapat mendiagnosis masalah guna menentukan sumber penyebab utama, memberikan solusi, dan melakukan pengendalian yang akan mempertahankan keuntungan yang diperoleh.

Lebih lanjut, Juran menyetengahkan adalah sepuluh langkah untuk memperbaiki mutu, yaitu:

- a. Membentuk kesadaran terhadap kebutuhan akan perbaikan dan peluang untuk melakukan perbaikan;
- b. Menetapkan tujuan perbaikan;
- c. Mengorganisasikan untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan;
- d. Menyediakan pelatihan;

³²*Ibid*, 52-53.

- e. Melaksanakan proyek-proyek yang ditujukan untuk pemecahan masalah;
- f. Melaporkan perkembangan;
- g. Memberikan penghargaan;
- h. Mengkomunikasikan hasil-hasil;
- i. Menyimpan dan mempertahankan hasil yang dicapai;
- j. Memelihara momentum dengan melakukan perbaikan dalam sistem regular perusahaan.

Selanjutnya Juran memperkenalkan manajemen mutu strategis (*strategic quality management*), yaitu suatu proses tiga bagian yang didasarkan pada staf pada tingkat berbeda yang memberi kontribusi unit terhadap peningkatan mutu. Manajer senior memiliki pandangan strategis tentang organisasi, manajer menengah memiliki pandangan operasional tentang mutu dan para karyawan memiliki tanggung jawab terhadap kontrol mutu.³³ Untuk membantu manajer dalam merencanakan mutu, Juran telah mengembangkan sebuah pendekatan disebut Manajemen Mutu Strategis (*strategic quality management*). SQM adalah sebuah proses tiga bagian berdasarkan staf pada tingkat berbeda yang memberi kontribusi unik terhadap peningkatan mutu. Manajemen senior memiliki pandangan strategis tentang organisasi, manajer menengah memiliki pandangan operasional tentang mutu, dan para karyawan memiliki tanggung jawab terhadap control mutu. Ini adalah sebuah ide yang cocok diterapkan dalam konteks pendidikan dan mirip dengan gagasan yang telah dikembangkan oleh consultant at Work dalam upaya meningkatkan mutu dalam pendidikan.³⁴

³³Sallis, Edward, *Total Quality Management in Education*, (Jogjakarta: IRCiSoI, Cet-7, 2008), 52-53.

³⁴*Ibid*, 108.

Kesimpulan

Pendidikan Islam adalah bimbingan terhadap pertumbuhan rohani dan jasmani menurut ajaran Islam dengan hikmah, mengarahkan, mengajarkan, melatih, mengasuh, dan mengawasi berlakunya semua ajaran Islam sehingga mutu pendidikan Islam dapat diartikan sebagai bagaimana pengelola lembaga pendidikan Islam bisa menyeimbangkan antara proses dan hasil pendidikan yang pada akhirnya peserta didik (lulusannya) menjadi manusia muslim yang berkualitas, dalam arti, peserta didik mampu mengembangkan pandangan hidup, sikap hidup dan ketrampilan hidup yang berperspektif Islam. Hal ini menunjukkan bahwa mutu pendidikan Islam diukur dengan pandangan hidup, sikap dan ketrampilan hidup berbasis Islam.

Menurut Joseph Juran mutu adalah kesesuaian untuk penggunaan (*fitness for use*), ini berarti bahwa suatu produk atau jasa hendaklah sesuai dengan apa yang diperlukan atau diharapkan oleh pengguna dimana 'kesesuaian untuk digunakan (*fitness for use*)' ini mengandung pengertian bahwa suatu produk atau jasa harus dapat memenuhi apa yang diharapkan oleh para pemakainya³⁵. Pengertian kesesuaian untuk digunakan ini mengandung lima dimensi yaitu: mutu desain, mutu kesesuaian, ketersediaan, keamanan, dan *field use*. Sementara kecocokan penggunaan tersebut didasarkan atas lima ciri utama, yaitu: teknologi (kekuatan atau daya tahan), psikologis (citra rasa atau status), waktu (kehandalan), kontraktual (adanya jaminan), dan etika (santun ramah dan jujur).

Implementasi konsep mutu Juran dalam lembaga pendidikan Islam dapat dilakukan dengan pemenuhan mutu desain pendidikan dengan merujuk pada berbagai kebijakan pemerintah tentang pendidikan, khususnya pendidikan Islam, yang dituangkan dalam visi, misi, dan tujuan pendidikan serta kurikulum yang ditawarkan. Dalam implementasi perencanaan model Juran, khususnya tentang penentuan pelanggan dan kebutuhan pelanggan, lembaga negeri dihadapkan kebijakan sistem zonasi, di mana pelanggan sudah ditentukan pemerintah. Berbeda dengan lembaga pendidikan swasta. Takpelak, kebijakan sistem zonasi

³⁵Fandy Tjiptono & Anastasia Diana, *Total Quality Management*, (Yogyakarta: Andi:2003), 53.

(dan beberapa kebijakan kurikulum) seringkali meruntuhkan 'keistimewaan produk' pendidikan yang diselenggarakan sebagaimana tuntutan konsep Juran.

Tantangan terbesar dalam upaya peningkatan atau perbaikan mutu pendidikan dalam setiap lembaga pada dasarnya terletak pada kesadaran setiap anggota organisasi lembaga dalam memandang pentingnya mutu. Dengan mengadopsi tentang arti pentingnya visi, misi dan tujuan lembaga, kesadaran mutu harus menjadi acuan berpikir, acuan bertindak dan acuan berperilaku guru, siswa dan warga sekolah lainnya. Mutu harus ditempatkan sebagai dambaan bersama akan menjadi apa di masa depan. Artinya, standar mutu yang ditetapkan harus dijadikan pedoman bersama sekolah dan anggotanya menuju citra organisasi yang didambakan dan bagaimana lembaga pendidikan berekstensi.

Daftar Rujukan

- Bastian, Aulia Reza. *Reformasi Pendidikan: Langkah-langkah Pembaharuan dan Pemberdayaan Pendidikan Dalam Rangka Desentralisasi Sistem Pendidikan Indonesia*, Yogyakarta: Laperia Pustaka Utama, 2002.
- Farodis, Zian, *Panduan Manajemen Pendidikan ala Harvard University*, Yogyakarta: Diva Press, 2011.
- H. Makawimbang, Jerry, *Supervisi dan Peningkatan Mutu Pendidikan*, Bandung: CV Alfabeta, 2011.
- Nata, Abuddin, *Ilmu Pendidikan Islam*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2010.
- S. Arcaro, Jerome *Pendidikan Berbasis Mutu*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2005.
- S. Arcaro, Jerome *Pendidikan Berbasis Mutu: Prinsip-Prinsip Perumusan Dan Tata Langkah Penerapan*, Yogyakarta : Pustaka Pelajar, 2007.
- Sallis, Edward, *Total Quality Management In Education Manajemen Mutu Pendidikan*, Yogyakarta: IRCiSoD, 2006.
- Sallis, Edward, *Total Quality Management in Education*, Jogjakarta: IRCiSoI, Cet-7, 2008.
- Sukarno, *Budaya Politik Pesantren Perspektif Interaksionisme Simbolik*, Yogyakarta: Interpena, 2012.
- Tjiptono & Anastasia Diana, Fandy, *Total Quality Management*, Yogyakarta: Andi, 2003.
- Zamroni, *Dinamika Peningkatan Mutu*, Yogyakarta: Gavin Kalam Utama. Malang: UMM Press, 2011.